



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANJA SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2019-2020
DAN PENYELESAIAN PENANGANAN MASALAH TENAGA HONORER
KOMISI II DPR RI
KE KANTOR REGIONAL (KANREG) VIII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) BANJARMASIN
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019 – 2020
TANGGAL 13-15 FEBRUARI 2020

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN PANJA

Saat ini pemerintah sedang melakukan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerimaan CPNS tahun 2019 diselenggarakan pada 65 instansi pusat dan 456 instansi daerah dengan memperhatikan analisis jabatan, analisis beban kerja, kebutuhan instansi, potensi dan arah pembangunan daerah serta kondisi geografis. Kebutuhan formasi yang ditetapkan berdasarkan data yang ada pada kami berjumlah 150.315 formasi yang terdiri dari 36.935 formasi pusat dan 113.380 formasi daerah. Jumlah formasi CPNS tahun 2019 ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah formasi CPNS tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 238.015 formasi.

Melalui seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 diharapkan dapat diperoleh ASN yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan akan perkembangan dan dinamika persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk itu, sebagai mitra kerja dari Kementerian PANRB dan BKN yang merupakan instansi yang mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS, Komisi II DPR RI RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019 harus dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, dalam rangka mengintensifkan pengawasan terhadap kelancaran penyelenggara seleksi penerimaan CPNS, Komisi II DPR RI telah membentuk Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorar.

Hal ini menjadi penting, karena terkait seleksi CPNS tahun 2019 ini Komisi II DPR RI juga menerima berbagai keluhan baik dari peserta maupun pihak pemerintah daerah, serta dari berbagai unsur masyarakat. Beberapa hal yang menjadi keluhan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Kurang maksimalnya sosialisasi terkait pelaksanaan seleksi (termasuk hal-hal teknis seperti penurunan passing grade, perubahan metode dalam soal-soal SKD, dan lain-lain).
- Masalah anggaran dimana sebagian besar daerah mengalami kerepotan untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan seleksi CPNS karena tidak teralokasi dalam APBD (pemberitahuan akan dilaksanakannya seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 diterima setelah pembahasan APBD selesai dilaksanakan).
- Masalah formasi yang menurut sebagian besar daerah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Disamping terkait seleksi penerimaan CPNS, melalui kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan ini, Panja Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan

berkaitan dengan Tenaga Honorer, khususnya penanganan terhadap Tenaga Honorer Kategori II yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 11 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Arif Wibowo/Fraksi PDIP beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO	No. Anggota	NAMA	KETERANGAN
1	A-210	Arif Wibowo	Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II/F-PDIP
2	A-141	Drs. Djarot Saiful H, M.Si	Anggota/F-PDIP
3	A-283	Ir. Hanan Rozak, M.S.	Anggota/F-Golkar
4	A-80	Dr. Ir. H. Sodik Mujahid, M.Sc.	Anggota/F-Gerindra
5	A-116	R. Imron Amin, SH.,MH	Anggota/F-Gerindra
6	A-384	M. Syamsul Luthfi, SE	Anggota/F-Nasdem
7	A-534	H. Zulkifli Anwar	Anggota/F-Demokrat
8	A-541	H. Mohamad Muraz, SH.,MM.	Anggota/F-Demokrat
9	A-428	Teddy Setiadi, S.I Kom	Anggota/F-PKS
10	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/F-PAN
11	A-518	Mitra Fakhruddin	Anggota/F-PAN
12		Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
13		Taofiek Hidayat	Sekretariat Komisi II
14		Hisyam Wildan	Sekretariat Komisi II
15		Satya Alvino Pinandito	Tenaga Ahli Komisi II
16		Anggia Michel	Tenaga Ahli Komisi II
17		Rifqi Makdudi	TV Parlemen
18		Surahmat Eko B	Media Sosial

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli dan 3 (tiga) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 13-15 Februari 2020, dimana Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

a. Pemaparan Sekretaris Utama BKN

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan apresiasi atas kunjungan kerja Panja Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2019 dan Penyelesaian Penanganan Tenaga Honorer Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota Komisi II DPR RI dapat melihat secara faktual kondisi gedung Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin yang sudah berdiri sejak 2005 dan perlu mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana. Wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin meliputi 4 provinsi yaitu: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Wilayah kerja yang sangat luas menyebabkan beban kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin cukup berat, karena pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak semua bisa dihadapi dengan aturan tetapi juga harus dilakukan secara hati-hati dan dengan sepenuh hati. Terkait beberapa masalah dalam proses penerimaan CPNS tahun 2019 dan tenaga honorer, BKN menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- **Anggaran**
 Dalam hal ketersediaan anggaran, BKN mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan Menteri PANRB yang menyatakan bahwa anggaran untuk penerimaan CPNS tahun 2019 dibebankan kepada masing-masing instansi sehingga setiap instansi harus menyediakan alokasi anggarannya. Pada penerimaan CPNS tahun berikutnya diharapkan instansi pusat maupun daerah dapat melakukan langkah antisipasi agar dapat memiliki ketersediaan anggaran lebih awal.
- **Ketidaksesuaian formasi**
 BKN melakukan analisis jabatan pada setiap formasi baik pusat maupun daerah. Hasil analisis jabatan diusulkan kepada Kementerian PANRB untuk selanjutnya dilakukan penetapan formasi. Pada saat penetapan formasi, memang terdapat formasi yang tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah karena pemerintah pusat menganggap usulan formasi dari pemerintah daerah tidak sesuai dengan grand design nasional. Misalnya di Pemerintah Provinsi Papua yang mengusulkan lebih banyak jabatan administratif, sementara kebutuhan di daerah itu seharusnya lebih banyak ke jabatan yang menuntut keahlian tertentu seperti infrastruktur jalan dan lain-lain. Jika terdapat formasi kosong, maka tidak bisa begitu saja dilakukan pengisian formasi, karena penetapan formasi dilakukan berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan evaluasi jabatan (evjab). Jika pengisian formasi dilakukan begitu saja, bisa jadi pegawai ASN yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan instansi.
- **Praktik Percaloan**
 BKN sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah praktik percaloan, salah satunya dengan melakukan sosialisasi di media, namun masih saja ada masyarakat yang tertipu dengan janji-janji manis dapat menjadi PNS dengan memberikan sejumlah uang. Jika terjadi hal seperti ini, BKN segera melaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) agar dapat segera dilakukan langkah tindaklanjutnya. Selain itu, pada penerimaan CPNS tahun 2019 ini banyak terjadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pelamar CPNS. Pelamar tidak mau menunjukkan KTP asli, sehingga di beberapa tempat BKN menemukan “joki” dalam pelaksanaan tes CAT. Di Kota Makassar BKN menemukan 4 orang peserta tes yang menjadi “joki.” Selain joki, ditemukan pula banyak pelamar yang mengunggah ijazah dan transkrip palsu. BKN mengantisipasi pemalsuan dokumen dengan mencantumkan klausa di persyaratan bahwa jika dikemudian hari diketahui ada dokumen-dokumen yang tidak benar (palsu), maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai PNS.
- **Penyelesaian masalah tenaga honorer**
 Roadmap penyelesaian tenaga honorer sudah disiapkan oleh Kementerian PANRB dan sudah dibahas pada rapat dengan panselnas penerimaan CPNS tahun 2019. Penjelasan mengenai roadmap tersebut diharapkan dapat segera disampaikan kepada Komisi II DPR RI dalam rapat kerja/rapat dengar pendapat yang akan datang.
- **Penilaian kinerja PNS**
 Penilaian kinerja PNS dilakukan setiap tahun. Pada bulan Januari setiap awal tahun, setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Dari SKP ini dapat diketahui apakah kinerja seorang PNS telah memenuhi target atau tidak. Bagi PNS yang penilaian SKP nya melampaui target maka diberikan reward berupa bahan material, peningkatan tunjangan kinerja, hingga kenaikan pangkat. Sedangkan bagi PNS yang tidak memenuhi target SKP dapat diberikan sanksi sesuai dengan PP tentang Disiplin PNS.

b. Pemaparan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan manajemen ASN dan sebagai penyelenggara manajemen ASN di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan BKN No. 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, tugas dan fungsi Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin antara lain: 1) penetapan pertek kenaikan pangkat, pindah instansi, PMK, pencantuman gelar, mutase, penerbitan Karpeg/Karis/Karsu, dan lain-lain 2) fasilitasi bimtek/sosialisasi kepegawaian, fasilitasi kinerja dan monev e- kinerja, dan supervisi kepegawaian 3) Updating data kepegawaian secara elektronik/fisik 4) penetapan NIP, pertek pensiun, dan mutasi keluarga 5) fasilitasi CAT. Wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin antara lain: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 46 wilayah provinsi/kabupaten/kota. Pada penerimaan CPNS tahun 2019 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di setiap provinsi di wilayah kerja yaitu: Provinsi Kalimantan Selatan (8 titik lokasi mandiri), Provinsi Kalimantan Tengah (11 titik lokasi mandiri), Provinsi Kalimantan Timur (9 titik lokasi mandiri), dan Provinsi Kalimantan Utara (3 titik lokasi mandiri). Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) dilaksanakan mulai tanggal 27 Januari 2020-28 Februari 2020. Hingga saat ini Pelaksanaan SKD masih berjalan untuk instansi vertikal dan untuk pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

Berikut ini tabel 1.1. progress pelaksanaan SKD di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

	Instansi Vertikal			Instansi Pemerintah Daerah			
	Jumlah Instansi	Selesai	Sisa		Jumlah Instansi	Selesai	Sisa
Kanreg VIII BKN	25	23	2	Provinsi Kalteng	15	6	7
Kantor BKN UPT Palangkaraya	9	9	-	Provinsi Kalsel	14	7	7
Kantor BKN UPT Balikpapan	17	11	6	Provinsi Kaltim	9	5	4
Kantor BKN UPT Tarakan	8	8	-	Provinsi Kaltara	3	-	3

Formasi CPNS tahun 2019 yang ditetapkan Kementerian PANRB untuk Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 2.902 formasi. Jumlah pelamar sebanyak 56.291 orang dan jumlah pelamar yang lolos seleksi administrasi sebanyak 52.737 orang. Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS tahun 2019.

Berikut ini tabel 1.2. Jumlah peserta CPNS tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan.

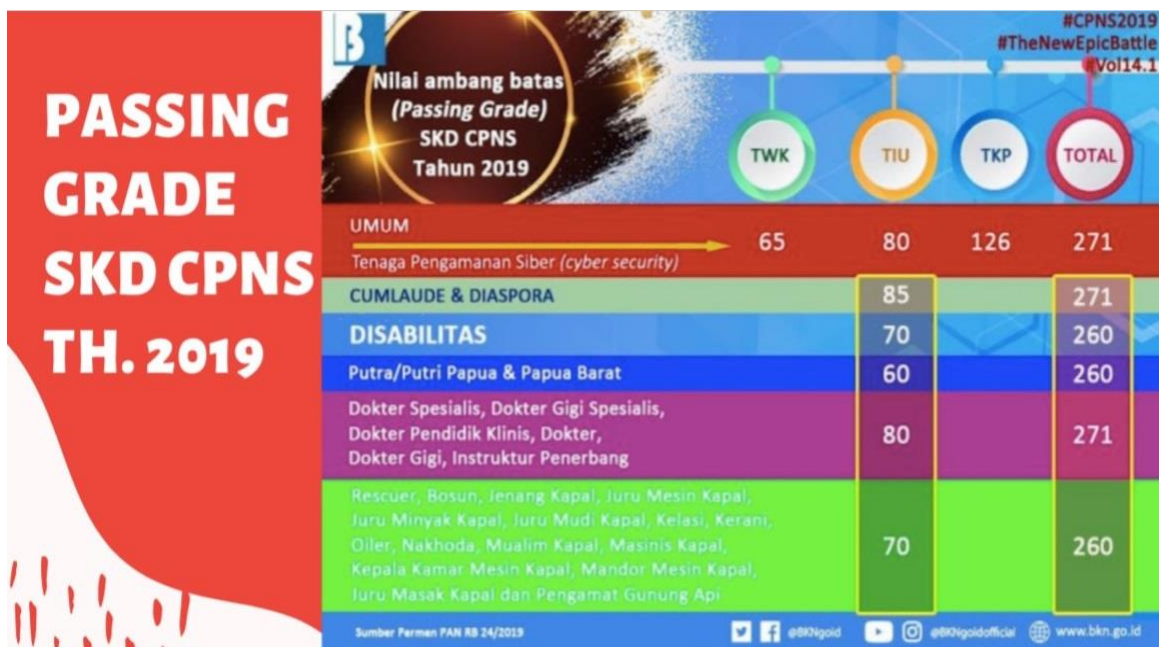
NO	Nama Daerah	CPNS TAHUN 2019			P1 TL TIDAK IKUT UJIAN	PESERTA IKUT UJIAN
		Formasi	Pelamar	Peserta yang Lulus ADM		
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	460	11.005	9.862	15	9.847
2	Pemerintah Kab. Balangan	123	3.217	3.125	-	3.125
3	Pemerintah Kab. Hulu sungai selatan	261	3.609	3.495	-	3.495
4	Pemerintah Kab. Hulu sungai Tengah	292	5.540	5.540	-	5.540
5	Pemerintah Kab Hulu Sungai Utara	108	2.470	2.371	-	2.371
6	Pemerintah Kab. Kotabaru	144	2.541	2.120	-	2.120
7	Pemerintah Kab. Tanah bumbu	145	2.745	2.622	1	2.621
8	Pemerintah kab. Tanah laut	182	2.528	2.423	1	2.422
9	Pemerintah Kab. Banjar	273	3.610	3.315	2	3.313
10	Pemerintah Kab. Barito kuala	175	3.576	3.466	4	3.462
11	Pemerintah Kab. Tapin	218	3.689	3.531	-	3.531
12	Pemerintah Kota Banjarbaru	188	4.004	3.743	-	3.743
13	Pemerintah Kab. Tabalong	251	4.873	4.762	-	4.762
14	Pemerintah Kota Banjarmasin	82	2.884	2.362	4	2.358
	Total tilok Prov	2.902	56.291	52.737	27	52.710

BKN memberikan masa sanggah bagi pelamar CPNS tahun 2019 yang merasa telah memberikan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ditentukan namun hasil seleksi administrasi menyatakan tidak memenuhi syarat. Jumlah pelamar yang melakukan sanggahan sebanyak 1.397 pelamar dan jumlah sanggahan yang memenuhi syarat sebanyak 462 orang. Berikut ini tabel 1.3. Jumlah pelamar yang melakukan sanggahan dalam penerimaan CPNS tahun 2019.

Instansi	Verif MS	Verif TMS	Menyanggah	Sanggah dijawab	Sanggah dijawab MS
1 6800 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	9862	1143	466	466	106
2 6801 - Pemerintah Kab. Banjar	3315	266	78	78	3
3 6802 - Pemerintah Kab. Tanah Laut	2423	105	33	33	18
4 6803 - Pemerintah Kab. Tapin	3531	158	48	48	3
5 6804 - Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	3495	114	36	36	12
6 6805 - Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	5540	365	59	59	10
7 6806 - Pemerintah Kab. Barito Kuala	3466	110	27	27	9
8 6807 - Pemerintah Kab. Tabalong	4762	111	22	22	6
9 6808 - Pemerintah Kab. Kotabaru	2120	421	335	335	222
10 6809 - Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2371	99	41	41	22
11 6810 - Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	2622	196	36	36	1
12 6811 - Pemerintah Kab. Balangan	3125	92	67	67	38
13 6871 - Pemerintah Kota Banjarmasin	2362	366	123	123	12
14 6872 - Pemerintah Kota Banjarbaru	3743	262	26	26	0
Total Kalsel	52737	3808	1397	1397	462

Passing grade pada SKD CPNS tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan penerimaan CPNS tahun 2018. Hal ini dilakukan agar meningkatkan peluang kelulusan tes SKD mengingat pada tahun 2018 persentase kelulusan peserta pada tahap SKD hanya sebesar 3%. CPNS tahun 2018 yang telah mendapatkan NIP berjumlah 9.019

pegawai. Penurunan passing grade mendapat tanggapan positif dari masyarakat terlihat dari antusiasme jumlah pelamar dan persentase kelulusan yang meningkat. Sampai saat ini persentase kelulusan SKD sebesar 50% di Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 1.4 Passing grade SKD CPNS tahun 2019.



Alokasi formasi bagi penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 48 formasi khusus dan 5 formasi umum. Kesiapan sarana dan prasarana disabilitas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain: 1) setiap instansi wajib memastikan jenis disabilitas 2) setiap instansi wajib menyediakan petugas khusus pendamping peserta 3) setiap instansi wajib menyediakan audio khusus tuna netra yang berlaku untuk formasi khusus disabilitas.

Tabel 1.5. Formasi disabilitas di Provinsi Kalimantan Selatan.

No	INSTANSI	JUMLAH FORMASI INSTANSI	FORMASI DISABILITAS		JUMLAH
			UMUM	KHUSUS	
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	460	5	5	10
2	Pemerintah Kota banjarbaru	188	-	6	6
3	Pemerintah Kota Banjarmasin	82	-	2	2
4	Pemerintah Kab. Barito kuala	175	-	3	3
5	Pemerintah Kab. Banjar	273	-	1	1
6	Pemerintah Kab. Tapin	218	-	2	2
7	Pemerintah Kab. Hulu sungai selatan	261	-	4	4
8	Pemerintah Kab. Hulu sungai Tengah	292	-	6	6
9	Pemerintah Kab Hulu Sungai Utara	108	-	2	2
10	Pemerintah Kab. Balangan	123	-	2	2
11	Pemerintah Kab. Tabalong	251	-	5	5
12	Pemerintah kab. Tanah laut	182	-	4	4
13	Pemerintah Kab. Tanahumbu	145	-	3	3
14	Pemerintah Kab. Kotabaru	144	-	3	3
	Total	2.902	5	48	53

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dalam penerimaan CPNS tahun 2019 melakukan berbagai persiapan di titik lokasi penyelenggaraan tes SKD serta ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai di setiap titik lokasi. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin melakukan uji coba melalui simulasi di lokasi ujian mandiri dan petugas BKN hadir H-2 pelaksanaan tes SKD. Sedangkan di titik lokasi yang baru petugas BKN hadir H-3 untuk memastikan perseiapan dan memiliki waktu yang cukup untuk perbaikan jika ada alat yang rusak. Petugas BKN juga mengadakan pelatihan bagi panitia penerimaan CPNS tahun 2019 di setiap instansi. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan SKD antara lain: 1) sosialisasi persiapan pelaksanaan tes 2) sosialisasi waktu pelaksanaan tes dan pengumuman hasil tes SKD. Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian Kantor

Regional VIII BKN Banjarmasin yaitu tentang keamanan server. Keamanan server di Kanreg dan UPT dilakukan dengan pengamanan standar steril di ruangan. Ruang ujian dikunci dan disegel yang ditandatangani dan didokumentasikan oleh BKN Bersama dengan instansi. Sedangkan untuk keamanan server di titik lokasi mandiri, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin melakukan penyegelan pada tombol power dan power outlet server dan ditandatangani serta didokumentasikan oleh BKN dan instansi. Server dibawa ke tempat menginap petugas BKN karena tidak ada pengamanan standar di lokasi ujian.

Saat ini sedang musin hujan sehingga curah hujan menyebabkan banjir di beberapa titik lokasi. Terbatasnya koneksi internet di beberapa titik lokasi juga menjadi kendala dalam penerimaan CPNS tahun 2019. Langkah antisipasi listrik dan kendala jaringan internet antara lain: 1) menyiapkan mesin genset di setiap titik lokasi 2) menggunakan 2 jalur internet (VPN dan multi provider) 3) Koordinasi dengan pihak PLN. Selain kendala tentang cuaca dan jaringan internet, ketersediaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2019. Namun, revisi DIPA penambahan anggaran seleksi CPNS baru turun H-1 sebelum pelaksanaan tes SKD.

c. Pemaparan Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan

Pada bulan Februari 2019, penanganan masalah tenaga honorer kategori II, khususnya yang berusia di atas 35 tahun. Pemerintah membuka seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK menjadi salah satu alternative pilihan bagi tenaga honorer kategori II yang tidak memenuhi syarat menjadi CPNS yang mayoritas karena tidak memenuhi syarat Batasan usia. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 837 orang tenaga honorer kategori II yang mengikuti seleksi PPPK tahun 2019 dan sebanyak 536 orang peserta yang lulus tes PPPK. Namun hingga saat ini peserta tes yang lulus, belum ditetapkan NIP nya karena belum ada usulan dari daerah serta peraturan presiden tentang pengangkatan PPPK belum juga terbit sampai hari ini.

Tabel 1.6. Jumlah peserta seleksi PPPK pada tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan.

NO	INSTANSI	PESERTA SELEKSI PPPK TAHUN 2019	PESERTA YANG LULUS SELEKSI PPPK TAHUN 2019
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	50	43
2	Pemerintah Kota banjarbaru	0	0
3	Pemerintah Kota Banjarmasin	0	0
4	Pemerintah Kab. Barito kuala	116	73
5	Pemerintah Kab. Banjar	132	94
6	Pemerintah Kab. Tapin	35	21
7	Pemerintah Kab. Hulu sungai selatan	45	30
8	Pemerintah Kab. Hulu sungai Tengah	46	37
9	Pemerintah Kab Hulu Sungai Utara	45	43
10	Pemerintah Kab. Balangan	33	21
11	Pemerintah Kab. Tabalong	180	89
12	Pemerintah kab. Tanah laut	112	58
13	Pemerintah Kab. Tanah bumbu	43	27
14	Pemerintah Kab. Kotabaru	0	0
	Total	837	536

Penanganan bagi tenaga honorer kategori II yang belum lulus seleksi CPNS dan tenaga honorer non kategori, BKD Provinsi Kalimantan Selatan memiliki data bahwa jumlah tenaga honorer non kategori Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10.548 orang dan jumlah total tenaga honorer non kategori di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 34.928 orang.

Tabel 1.7. Jumlah tenaga honorer non kategori di Provinsi Kalimantan Selatan.

NO	INSTANSI	HONORER NON KATEGORI I DAN KATEGORI II
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	10.548
2	Pemerintah Kota banjarbaru	1.367
3	Pemerintah Kota Banjarmasin	-
4	Pemerintah Kab. Barito kuala	469
5	Pemerintah Kab. Banjar	-
6	Pemerintah Kab. Tapin	-
7	Pemerintah Kab. Hulu sungai selatan	3.540
8	Pemerintah Kab. Hulu sungai Tengah	839
9	Pemerintah Kab Hulu Sungai Utara	-
10	Pemerintah Kab. Balangan	3.610
11	Pemerintah Kab. Tabalong	1.852
12	Pemerintah kab. Tanah laut	6.818
13	Pemerintah Kab. Tanah bumbu	4.723
14	Pemerintah Kab. Kotabaru	1.162
	Total	34.928

Mekanisme perekrutan tenaga honorer di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilakukan jika tersedia formasi kosong dan tidak ada pegawai yang mengisi formasi tersebut. Ketika seseorang berminat menjadi tenaga honorer dan ada formasi yang kosong maka tenaga honorer dapat bekerja di instansi pemerintah dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas sepengetahuan Sekretaris Daerah. Masa kontrak kerja bervariasi antara 6 bulan hingga 1 tahun. Kontrak kerja tenaga honorer terjamin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahunnya. Sehingga gaji/upah tenaga honorer dibayarkan dari anggaran yang ada di DPA per kegiatan, namun jika tahun itu tidak ada kegiatan maka tenaga honorer dapat diberhentikan. Sedangkan jumlah tenaga honorer kategori II di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1.499 orang.

Berikut ini tabel 1.8. Jumlah tenaga honorer kategori II di Provinsi Kalimantan Selatan.

NO	INSTANSI	HONORER KATEGORI II TAHUN 2014	KATEGORI II YANG LULUS TES TAHUN 2014	HONORER EKS KATEGORI II YANG TIDAK LULUS TES PER 31/3/2018	KETERANGAN
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	62	23	147	(39 TL + 108 P3D)
2	Pemerintah Kota banjarbaru	210	143	67	
3	Pemerintah Kota Banjarmasin	491	374	117	
4	Pemerintah Kab. Barito kuala	454	268	186	
5	Pemerintah Kab. Banjar	651	427	224	
6	Pemerintah Kab. Tapin	180	146	34	
7	Pemerintah Kab. Hulu sungai selatan	406	261	145	
8	Pemerintah Kab. Hulu sungai Tengah	186	138	48	
9	Pemerintah Kab Hulu Sungai Utara	100	83	17	
10	Pemerintah Kab. Balangan	149	112	37	
11	Pemerintah Kab. Tabalong	576	383	193	
12	Pemerintah kab. Tanah laut	455	307	148	
13	Pemerintah Kab. Tanah bumbu	395	307	88	
14	Pemerintah Kab. Kotabaru	158	110	48	
	Total	4.473	3.082	1.499	

BKD Provinsi Kalimantan Selatan berharap permasalahan tenaga honorer dapat ditindaklanjuti dengan proses seleksi penerimaan CPNS atau PPPK dengan menggunakan metode CAT agar pegawai ASN yang bekerja di instansi pemerintahan memang merupakan orang yang terpilih. Selain itu, diharapkan hasil seleksi CAT dapat diterima oleh semua pihak baik peserta yang lulus atau pun tidak lulus tes.

Terkait penilaian kinerja PNS, BKD Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan indikator kinerja individu setiap tahunnya sehingga laporan sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) mendapatkan nilai A meskipun penerapan sistem merit di Provinsi Kalimantan Selatan belum berjalan dengan baik. Bagi PNS yang memiliki kinerja baik

diterapkan mekanisme Tunjangan Tambah Penghasilan (TTP) yang kinerjanya dapat dilihat melalui SKP online. PNS membuat kontrak kerja dengan atasannya setiap awal tahun dan memaksa PNS untuk disiplin dalam bekerja. Jika kinerja PNS buruk dan tidak mencapai 100% maka PNS diberikan punishment sesuai dengan PP tentang disiplin PNS, mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan inspektorat.

III. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI meminta Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan anggaran agar alokasi anggaran untuk pelaksanaan seleksi CPNS dapat tersedia tepat waktu.
2. Komisi II DPR RI meminta Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pengusulan formasi agar pada saat penetapan formasi pemerintah daerah benar-benar mendapatkan formasi yang sesuai dengan kebutuhan PNS di daerah.
3. Komisi II DPR RI meminta Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin menjamin pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019-2020 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta memastikan tidak terjadi praktik percaloan/penipuan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
4. Komisi II DPR RI mendorong Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin melakukan percepatan proses penyusunan roadmap penyelesaian masalah tenaga honorer serta meminta Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin memberikan gaji/upah yang layak bagi tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer - Komisi II DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh data, informasi, ataupun masukan dari berbagai pihak terkait seleksi penerimaan CPNS dan upaya penanganan tenaga honorer akan menjadi bahan yang berguna bagi Panja untuk melahirkan rekomendasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan untuk perbaikan pelaksanaan seleksi CPNS kedepan, maupun upaya penyelesaian masalah tenaga honorer. Kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2020
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Arif Wibowo
A-210